

Prodi Administrasi Publik

JURNAL SKRIPSI ICHA

 JURNAL SKRIPSI ICHA
 Fisip
 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3393068464****Submission Date****Oct 31, 2025, 1:51 AM UTC****Download Date****Oct 31, 2025, 1:53 AM UTC****File Name****JURNAL_SKRIPSI_ICHA.pdf****File Size****145.0 KB****6 Pages****2,477 Words****15,942 Characters**

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 15 words)

Exclusions

- 20 Excluded Sources

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 8%  Publications
- 13%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19% Internet sources
- 8% Publications
- 13% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	eprints.walisongo.ac.id	3%
2	Internet	repositori.uma.ac.id	2%
3	Internet	id.123dok.com	2%
4	Internet	repository.ums.ac.id	2%
5	Internet	repository.unpas.ac.id	1%
6	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	1%
7	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%
8	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
9	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
10	Internet	webofscientist.pubmedia.id	<1%
11	Student papers	LPPM	<1%

12	Student papers	Universitas Sam Ratulangi	<1%
13	Internet	repo.iain-tulungagung.ac.id	<1%
14	Internet	repository.unars.ac.id	<1%
15	Internet	mediabrantas.id	<1%
16	Internet	sd.unej.ac.id	<1%

ACTON : Jurnal Ilmiah
Vol.... No..., Tahun 2025

ISSN Cetak :
ISSN Online :

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA CURAH JERU KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO

Usrotul Hasanah¹⁾, Senain²⁾, Icha Wulandari³⁾

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email : 202114085@unars.ac.id

ABSTRAK

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo merupakan bantuan sosial yang hadir dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran yang akan disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah Rp. 200.000 setiap bulannya melalui rekening bank penyalur yang akan digunakan untuk membeli bahan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Program BPNT merupakan salah satu bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT di Desa Curah Jeru telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan teknis di lapangan.

Tahapan pelaksanaan program BPNT di desa ini meliputi ; Perisapan, sosialisasi dan edukasi, registrasi dan retrebusi, penyaluran dana bantuan, pemanfaatan dana bantuan. Masing-masing tahapan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, pendamping sosial, hingga Dinas Sosial. faktor pendukung implementasi program antara lain adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dan pendamping sosial, serta tingginya antusiasme masyarakat terhadap bantuan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterlambatan pencairan bantuan (hingga dua sampai tiga bulan). Dengan demikian, diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi serta evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Implementasi, BPNT, Tahapan Program

ABSTRAC

The Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Curah Jeru Village, Panji District, Situbondo Regency is a social assistance initiative designed to improve the effectiveness and accuracy of aid distribution to Beneficiary Families (KPM). Each beneficiary receives IDR 200,000 per month through a distributing bank account, which can be used to purchase food items according to their individual needs. The BPNT program is one of the central government's social assistance schemes aimed at reducing the expenditure burden of Beneficiary Families (KPM).

This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the BPNT program in Curah Jeru Village has been implemented fairly well, although several technical challenges are still encountered in the field. The stages of BPNT program implementation in the village include preparation, socialization and education, registration and retribution, distribution of aid funds, and utilization of aid funds. Each stage is carried out in a structured manner and involves multiple parties, including the village government, social assistants, and the Department of Social Affairs.

Supporting factors for the program's implementation include good coordination between the village government and social assistants, as well as the high enthusiasm of the community toward the assistance. On the other hand, inhibiting factors include delays in fund disbursement, which may last two to three months. Therefore, it is necessary to enhance the effectiveness of communication and conduct comprehensive evaluations to ensure that the program operates more optimally and achieves its intended targets.

Keywords: Implementation, BPNT, Program Stages

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi hampir seluruh negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah Bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Indonesia memiliki masyarakat yang beranekaragaman suku, kebiasaan, adat, kehidupan dan agama.

Dengan demikian, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mengembangkan beberapa program yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Presiden sangat mengapresiasi Program BPNT, karena mampu mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan Sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang seimbang kepada peserta KPM, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan serta mendorong kearah pembangunan yang berkelanjutan. Program BPNT merupakan Program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA), Pemerintah mulai melakukan perubahan terkait program RASTRA menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikarenakan menimbulkan permasalahan terkait tepat jumlah yang masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per bulan dari yang seharusnya sebanyak 10 kg perbulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya yaitu Rp. 9.000,- per kg. Maka dari itu pemerintah mengubah nama RASTRA menjadi salah satu program yang sedang dilakukan pada saat ini yaitu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tata cara atau peraturan petunjuk teknis dan mekanisme dalam penyaluran bantuan pangan non tunai tersebut juga diatur dalam Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019. Program tersebut memiliki 4 mekanisme yaitu : proses registrasi dan pembukaan rekening, pelaksanaan pendistribusian KKS, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, penyaluran barang/jasa. Tujuan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagai kebutuhan pangan, memberikan

nutrisi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan Pangan bagi KPM, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Program bantuan pangan non tunai ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Diharapkan dengan adanya program BPNT dapat membantu masyarakat miskin mengatasi kebutuhan pangannya. Program BPNT diterima kepada KPM setiap bulannya adapun jumlah besaran uang terisi secara otomatis dari bank penyalur pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu sebesar Rp. 110.000,- yang diberikan kepada masing-masing masyarakat penerima manfaat. Selanjutnya pada tahun 2023 hingga sekarang bantuan pangan non tunai disalurkan oleh pemerintah dengan anggaran yang mencapai Rp. 45,1 triliun, Bantuan Pangan Non Tunai ini akan ditargetkan dan diterima 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan kepada masing-masing Per KPM sebanyak Rp. 200.000 ,- per bulan. Penerima manfaat kemudian dapat menggunakan saldo tersebut untuk membeli sembako di e-warong.

15 Namun, sejak tahun 2021 mekanisme mengalami perubahan, dimana penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Secara Non Tunai. Setelah itu masyarakat kurang mampu penerima manfaat BPNT akan mendapatkan kartu KKS yang berfungsi sebagai kartu elektronik untuk mengakses bantuan pangan non tunai. Bantuan tersebut disalurkan melalui Bank Himbara (BNI) ataupun kantor pos yang bekerjasama dengan program tersebut. Oleh karena itu KPM bisa membeli bahan pangan sesuai dengan kebutuhan yang diberikan oleh penyalur.

16 Dari penjelasan diatas, Situbondo termasuk Kabupaten yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Situbondo juga tergolong kedalam masyarakat yang berpenghasilan rendah yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Kabupaten Situbondo yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 17 Kecamatan, 132 Desa, dan 4 Kelurahan. Kecamatan Panji adalah Salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang melaksanakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tepatnya di Desa Curah Jeru. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Curah Jeru mulai dilaksanakan sejak tahun 2019. Dari hasil data masyarakat miskin tersebut dapat diuraikan bahwa di Dusun timur tercatat masyarakat miskin sebanyak 316 Kepala Keluarga, Dusun Tengah sebanyak 546 Kepala Keluarga, dan Dusun Barat sebanyak 432 Kepala Keluarga. Jadi jika dijumlahkan dalam satu desa Curah Jeru sebanyak 1.294 Kepala Keluarga yang tercatat sebagai masyarakat miskin. Masalah ketidaktepatan sasaran dalam memberikan bantuan pangan non tunai dikarenakan kurangnya validasi dan verifikasi data dari pusat yang dikeluarkan kepada pemerintah daerah sehingga menimbulkan complain masyarakat yang tidak menerima lagi program tersebut seperti ibu rofi'a.

Peraturan kementrian sosial yang tercantum diatas, masyarakat yang kurang mampu ataupun yang tidak menerima lagi Bantuan Pangan Non Tunai dapat dapat diajukan kepada pemerintah pusat dengan mengadakan musyawarah desa. Setelah dimusyawarahkan hasil musyawarah tersebut dirundingkan dengan masyarakat pusat dengan mengirim nama-nama masyarakat yang tidak mampu sehingga layak untuk menerima bantuan pangan non tunai. Berdasarkan observasi awal dari penjelasan di atas, menimbulkan fenomena terkait pelaksanaan program BPNT di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo kurang tepat sasaran yang disebabkan kurangnya pengomptimalan verifikasi dan validasi data KPM yang dilakukan oleh pemerintah,

sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat desa, pendamping sosial, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Teknik Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman (2014) adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data, yaitu melakukan pengumpulan dari data-data wawancara yang telah dilakukan sehingga data yang diperoleh benar-benar dapat terfokus sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu proses dalam penetapan kesimpulan yang didasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan informan dan data yang diperoleh sesuai atau dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program BPNT di Desa Curah Jeru telah berjalan sesuai dengan pedoman Kementerian Sosial. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang terdiri dari lima tahap utama, yaitu :

1. Persiapan,
Persiapan merupakan tahapan awal yang ada pada setiap program dan data penerima bantuan berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Pemerintah desa turut membantu dalam proses verifikasi dan validasi data untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Dalam proses ini, pihak desa melakukan musyawarah Bersama warga yang dianggap layak menerima bantuan. Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa koordinasi pelaksanaan yang harus dilakukan. Tahap koordinasi pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pembagian seperti koordinasi antara pemerintah Desa dan Dinas Sosial, koordinasi antara Pendamping Sosial dan Pemerintah Desa
2. Sosialisasi dan edukasi,
Sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Curah Jeru Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinsos Kabuapten Situbondo, Bank BNI 46, Bank BRI dan didampingi TKSK, dan pendamping PKH.
 - a. Ada beberapa tujuan dari adanya sosialisai dan edukasi antara lain :
 1. Untuk memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan yang ada dan juga daerah terkait kebijakan dan aspek pelaksanaan program dari BPNT.
 2. Untuk memberikan pemahaman kepada KPM terkait dengan pelaksanaan seperti tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan yang akan diberikan.
 3. Untuk memberikan informasi kepada KPM tentang pentingnya pemenuhan asupan dengan gizi yang cukup terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk pencegahan stunting pada anak.

- b. Pelaksanaan dalam sosialisasi dan edukasi berlangsung :
 1. Pemerintah.
 2. Bank penyalur.
 3. Pengelola e-warong.
 4. Tenaga pelaksanaan Bansos Pangan yang ada di setiap daerah masing-masing.
- c. Sasaran dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi antara lain :
 1. Pemerintah daerah setempat termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan juga Tim Koordinasi Bansos Pangan yang ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga tingkat Kecamatan.
 2. Perangkat desa yang ada di setiap desa masing-masing.
 3. Tenaga pelaksana Bansos Pangan.
 4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 5. Pengelola atau bisa juga pemilik dari e-warong.
 6. Bank Penyalur yang ada pada tingkat pusat ataupun daerah.
 7. Masyarakat umum yang ada di sekitar

3. Registrasi atau distribusi

Pemerintah kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di tingkat Kabupaten Situbondo di koordinasikan oleh tim koordinasi bansos pangan Kabupaten Situbondo. Yang ketiga koordinasi di tingkat Kecamatan camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi BPNT Kecamatan. Tugas tim koordinasi Kecamatan adalah merencanakan, melaksanakan, sosialisasi, pemantauan program di tingkat Kecamatan. Tim koordinasi BPNT dibantu oleh pendamping social BPNT dalam pendampingan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan dan Desa.

4. Penyaluran Dana Bantuan

Setelah tahap registrasi dan distribusi KKS, pada tahap berikutnya yang ada pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dengan penyaluran dan bantuan tersebut kepada masyarakat penerima manfaat KPM. Pada proses penyaluran bantuan program BPNT akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pada proses penyaluran dana bantuan program BPNT dan pihak bank penyalur tanpa mengenakan biaya apapun dalam pelaksanaannya.
2. Pada proses penyaluran akan dilakukan dengan memindahkan bukaan dana bantuan program BPNT dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan yang dimiliki oleh setiap KPM.
3. Pada proses pemindahan buku dana tersebut dapat dilaksanakan paling lama sekitar 30 hari semenjak dana tersebut masuk atau ditransfer dari kas negara Kementerian Sosial dengan melibatkan bank penyalur di dalamnya.
4. Konfirmasi terkait pada penyaluran dan akan dilakukan dengan melalui aplikasi Online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dan juga tetap memperhatikan peraturan yang telah ditetapkan oleh direktur jenderal perbendaharaan di Kementerian Keuangan.

5. Pemanfaatan Dana Bantuan

Setelah dana bantuan BPNT telah disalurkan maka tahap akhir dari pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan dengan tetap memperhatikan terkait ketentuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Proses pemanfaatan dana bantuan pada

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dilaksanakan melalui beberapa tahap diantaranya yaitu :

- A. Datang : keluarga Penerima Manfaat yang hendak memanfaatkan dana bantuan yang telah diberikan akan mendatangi ATM terdekat.
- B. Cek : Keluarga Penerima Manfaat terlebih dahulu melakukan pengecekan kuota dana bantuan melalui mesin ATM ataupun kantor pos.
- C. Pilih : Setelah melakukan pengecekan terkait kuota dana bantuan, maka KPM sudah dapat melakukan penarikan jumlah kuotanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Dari segi Persiapan, Persiapan program BPNT telah di laksanakan dengan cukup baik. Pemerintah desa Bersama Dinas Sosial, Pendamping, dan Pihak Terkait lainnya melakukan koordinasi, verifikasi, dan validasi data penerima berdasarkan DTKS.
2. Dari segi Sosialisasi, Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan di balai desa,, dengan melibatkan Dinas Sosial, Bank Penyalur, serta pendamping sosial. Sebagian besar KPM memahami informasi mengenai tujuan dan mekanisme program BPNT. Meskipun demikian, masih terdapat kecil masyarakat yang belum sepenuhnya memahami alur program, sehingga perlu pendekatan edukatif lanjutan secara berkala.
3. Dari segi Registrasi, Tahap ini berjalan lancar dengan dukungan perangkat desa dan pendamping. KPM melakukan verifikasi identitas, pembuatan KKS dan penyesuaian data (tunggalisasi) bagi yang telah memiliki KKS dari program PKH.
4. Dari segi penyaluran, Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening KPM tanpa potongan biaya. Penyaluran telah dilakukan sesuai prosedur, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu tepat waktu. Banyak penerima melaporkan bahwa pencairan kadang terjadi 2 hingga 3 bulan sekali. Selain itu terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran, dimana beberapa penerima tidak tergolong miskin tetapi tetap menerima bantuan.
5. Dari segi Pemanfaatan, Sebagian besar KPM memanfaatkan bantuan BPNT sesuai tujuan yakni untuk membeli kebutuhan pokok. Bantuan dianggap sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama oleh warga miskin tanpa penghasilan tetap. Meski demikian, masih diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan dana digunakan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Press.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Program Sembako*.
- BPS Kabupaten Situbondo. (2025). *Data Penduduk Miskin Kabupaten Situbondo*.